

# AKUNTABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN

**Puji Nuryati**

Magister Akuntansi FEB Universitas Sebelas Maret Surakarta

## **ABSTRACT**

*Education is one of public services. Public service education is very important thing for societ, in improving its quality, improvement quality of teachers and staff of education, as well education service management which of high quality need good corporate governance (GCG). The application of good governance can improve good public service. In management of financial education should follow/submit accountability principle and transparency. Accountability in management of education is needed as a justifying from to wards financial. The usage and performance school organizer. The aims of this paper are providing description accountability application and good corporate governance to public service education or school. This submitted because in fact there are only some schools which are implementing accountability and good corporate governance rightly. The main principles which are underlied good school governance are (first) accounting, (second) transparancy, and (third) participation. School/ education institution is public which is societies are providing their faith in education case need apply good school governance (GCG) even though there is not universal good governance model for school.*

**Keywords:** *Good school governance, accountability, good school governance.*

## **PENDAHULUAN**

Di era otonomi daerah pemerintah dituntut agar memberikan kesejahteraan pada masyarakat daerah dengan penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan sangat berpengaruh pada keberhasilan *good governance*. Penerapan *good governance* dapat meningkatkan *good public service*. Tata kelola Perusahaan yang baik, atau yang lebih populer dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG), adalah suatu proses dan struktur yang digunakan

meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan atau meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan, modal dan etika (Adinegara, 2011).

Pendidikan merupakan salah satu *public service*. Pelayanan pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas baik. Di mana terwujudnya keadaan pendidikan yang adil dan merata adalah salah satu dari kebutuhan pokok manusia. Peningkatan pelayanan publik tersebut sangat berarti dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dalam hal ini pelayanan publik pada sektor pendidikan.

Sejalan dengan pasal 51 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini akan mendorong pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Sesuai dengan ketentuan dalam MBS bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah juga harus menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan pada birokrasi kita, Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan pengukuran kinerja instansi pemerintah didaerah dalam rangka implementasi otonomi daerah demi terwujudnya konsep *good governance* (Adinegara, 2011).

Dalam dunia pendidikan akuntabilitas dapat berupa kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari *input*, proses serta *output*. Akuntabilitas dapat berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Slamet (2005) Pengertian akuntabilitas tidak hanya berupa pertanggungjawaban administratif keuangan saja, tetapi mencakup pula penggunaan/pemanfaatan, dan hasil kerjanya.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab marjinal pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap individu jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Namun demikian masih banyak perdebatan mengenai pengertian akuntabilitas seperti yang diungkapkan oleh Ilmuwan politik Robert Behn (dalam Amir N. Licht, 2002) membuka diskusi panjang akuntabilitas demokrasi di Amerika Serikat dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

"Apa yang kita maksud dengan 'akuntabilitas'? Apa sebenarnya yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa kita ingin 'untuk terus orang bertanggung jawab'? Kami berbicara seperti ini sepanjang waktu. Kami selalu berbicara tentang seseorang yang bertanggung jawab. Namun, ketika kita mengatakan itu 'kita akan menginginkan orang *accountable*'- apa yang kita lakukan benar-benar berarti?"

Sementara Behn mengakui ketidak mampuannya untuk menawarkan definisi dan dugaan yang baik bahwa "pemegang-akuntabilitas politisi, para pemangku kepentingan, auditor, para ulama, para pengacara, atau jurnalis tahu persis apa artinya memilih seseorang bertanggung jawab. Kemudian Behn menyimpulkan bahwa tanggung jawab tetap merupakan konsep yang sulit dipahami. Namun, Behn berpendapat bahwa bagi orang-orang yang mungkin bertanggung jawab, tanggung gugat berarti hukuman. Hal ini di bangun dari skandal Enron-WorldCom, Presiden George W. Bush berjanji bahwa akan ada konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam kesalahan. Meskipun Akuntabilitas tidak selalu tentang hukuman. Hal ini mengenai sejenis hubungan timbal balik.

Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005). Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah *rating* implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody`s Morgan, and Calper`s. Hal senada juga disampaikan dalam Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya *corporate governance*, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Berdasarkan paparan beberapa penelitian diatas menimbulkan pertanyaan mengenai gambaran penerapan akuntabilitas dan *good corporate governance* pada pelayanan publik bidang pendidikan atau sekolah yang sering disebut *Good School Governance*?

## AKUNTABILITAS

Gagasan akuntabilitas sektor publik di Amerika Serikat membawa arti sebagian besar mirip dengan makna bahasa Inggris. Romzek dan Dubnick dalam Amir N. Licht memberikan penjelasan wakil dari akuntabilitas ini, sebagai berikut: "Hubungan di mana seorang individu atau lembaga yang diadakan untuk menjawab untuk kinerja yang melibatkan beberapa pendelegasian wewenang untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Akuntabilitas adalah bentuk generik hubungan sosial yang ditemukan dalam berbagai konteks, *accountability* tidak selalu menyiratkan adanya demokrasi, melainkan menunjukkan bentuk *governance* yang dilakukan melalui beberapa pendelegasian wewenang.

Sebuah klasifikasi umum mengacu pada identitas petugas akuntabel-publik, politisi yang terpilih, dan identitas *accountee*-apakah itu DPR atau Kongres, media, masyarakat, dan sebagainya. Elemen lain yang digunakan untuk membuat perbedaan adalah isi dari tugas akuntabilitas, tetapi unsur ini tampaknya tidak menjadi faktor penting karena akuntabilitas sekarang umumnya dipahami sebagai kewajiban terbuka bertekstur dengan komponen inti tertentu: mempromosikan kepentingan *accountee* itu, transparansi dan pelaporan, dan kewajiban untuk menebus kesalahan (Amir N. Licht, 2002).

Dubnick memberikan kontribusi penting dalam pengamatan bahwa kondisi akuntabilitas secara etis. Dubnick juga menguraikan klasifikasi dari empat jenis "sistem akuntabilitas" yaitu, hukum, organisasi, profesional, dan politik. Sehingga "lembaga akuntabilitas" (masing-masing, kewajiban, *answerability*, tanggung jawab, dan *responsiveness*), di mana masing-masing lembaga memainkan peran baik sebagai tarik moral dan dorongan moral.

Menurut Slamet (2005: 5), "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban".

Sementara Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) dapat di prediksi, dan (4) partisipasi (ADB, 2008). Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini (ADB, 2008) Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Terdapat beberapa jenis akuntabilitas antara lain adalah akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural (LAN dan BPKP dikutip oleh Halim, 2004: 167). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara reguler akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas.

Sekarang setiap sekolah memiliki Komite Sekolah sebagai pengawas. Namun, di banyak sekolah, komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap dana-dana tersebut. Komite sekolah justru lebih sering menjadi legitimator bagi setiap langkah kepala sekolah. Posisi bendahara komite biasanya dipegang oleh salah satu guru di sekolah itu yang notabene bawahan kepala sekolah, sehingga sepak terjang kepala sekolah dalam penggunaan dana sekolah hampir tidak terkontrol (Bastian, 2007: 91).

Akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah mencakup harga buku yang wajar, kualitas buku yang dibeli, penggunaan buku secara efektif dan hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi, transparansi, akuntabilitas adalah sebuah kesatuan yang saling berkaitan. Peningkatan partisipasi harus diikuti peningkatan transparansi dan kemudian akan diikuti peningkatan akuntabilitas yang mempengaruhi tujuan.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan dapat dipercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pendidikan kepada publik (Depdiknas dalam Panduan Manajemen

Berbasis Sekolah).

Codd, seorang pakar kebijakan pendidikan dalam Marks Olssen, dkk (2004: 1), menyatakan bahwa dalam perspektif global, akuntabilitas dipengaruhi oleh kecenderungan manusia yang mengutamakan kebebasan. Kebebasan yang muncul secara baru (*neoliberalisme*) ikut mempengaruhi ketahanan moral orang dalam melaksanakan akuntabilitas.

Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan manajemen yang akuntabel merupakan suatu pranata sosial. Dikatakan sebagai pranata sosial karena di tempat tersebut terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang sosial yang membentuk suatu kesatuan dengan nilai-nilai dan budaya tertentu. Nilai-nilai dan budaya tersebut potensial untuk mendukung penyelenggaraan manajemen sekolah yang akuntabel, tetapi juga sebaliknya bisa menjadi penghambat. Dalam sebuah ilustrasi perusahaan, Stephen Robins (2001: 14) menyatakan: keberagaman tenaga kerja mempunyai implikasi penting pada praktik manajemen. Para manajer harus mengubah filosofi mereka dari memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama menjadi mengenali perbedaan dan menyikapi mereka yang berbeda dengan cara-cara yang menjamin kesetiaan karyawan dan peningkatan produktivitas sementara, pada saat yang sama, tidak melakukan diskriminasi. Apa yang dikemukakan Robins berangkat dari asumsi akan perbedaan nilai dan budaya dari setiap anggota organisasi. Ada nilai-nilai yang dapat mendukung nilai-nilai organisasi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Dalam konteks ini, dibutuhkan peran pemimpin untuk dapat mengelolanya. Jadi, faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan, tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas. Kalau ditelisik lebih jauh faktor orang sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari masyarakat dengan budaya tertentu.

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa, akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi (Darmawan, 2011).

### ***Good School Governance***

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak

dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

*Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005). Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah *rating* implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody's Morgan, and Calper's. Penerapan GCG di sektor publik berlaku untuk berbagai bidang salah satunya sektor pendidikan yang selanjutnya di sebut *Good School Governance*.

*Good School Governance* (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Di dalam GSG pengelolaan keuangan menjadi salah satu pokok bahasannya. Pengelolaan keuangan sekolah akhir-akhir ini menjadi isu yang disorot tajam oleh berbagai pihak, termasuk di dalamnya oleh para orang tua murid sendiri. Keterbukaan dan pertanggungjawaban mengelola keuangan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk berani diungkapkan oleh pihak manajemen sekolah.

Sekolah/lembaga pendidikan pada dasarnya adalah sebuah lembaga publik, di mana masyarakat memberikan kepercayaannya dalam hal pendidikan. Adanya kepercayaan masyarakat pada sekolah/lembaga pendidikan adalah sebuah amanah yang harus dikelola secara baik. Ini tertuang antara lain dalam prinsip-prinsip *Good School Governance* (GSG). Adapun prinsip-prinsip GSG ada 3, yaitu:

1. Prinsip Partisipasi

Keterlibatan secara aktif para Orang Tua/Wali Murid dan Komite Sekolah dalam setiap kegiatan di sekolah. Berperan juga sebagai kontrol terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Manajemen Sekolah.

2. Prinsip Transparansi

Terbuka untuk setiap kegiatan yang dijalankan oleh pihak Manajemen Sekolah, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan keuangan. Adanya sekolah gratis, adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terasa tidak optimal apabila Pengelola Sekolah tidak transparan dalam mengelolanya, meskipun itu bukan dana yang berasal dari orang tua murid. Justru ketika ada dana-dana publik masuk ke sekolah, maka keterbukaan informasi manajemen keuangan menjadi sebuah tuntutan. Memang tidak banyak sekolah yang berani melaporkan pengelolaan keuangannya secara transparan. Manajemen sekolah ditantang untuk hal yang satu ini.

3. Prinsip Akuntabilitas

Pertanggungjawaban dana masyarakat yang sudah diberikan kepada Sekolah harus dapat diakses secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Orang Tua/Wali Murid, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Laporan Keuangan Sekolah menjadi sebuah keharusan untuk sebuah akuntabilitas.

Ofsted dalam artikel *School governance: learning from the best* menyampaikan bahwa di Inggris ada suatu lembaga relawan pendidikan terbesar. Sejak tahun 1988 lembaga ini membuat sekolah telah mengambil tanggung jawab dan peran lebih penting karena sekolah telah mendapatkan peningkatan otonomi. Dewan melengkapi dan meningkatkan kepemimpinan sekolah dengan memberikan dukungan dan tantangan, memastikan bahwa semua tugas hukum terpenuhi, menunjuk kepala sekolah dan menahan mereka untuk memperhitungkan dampak dari pekerjaan sekolah untuk meningkatkan hasil untuk semua murid.

Ofsted juga menyampaikan Kerangka untuk pemeriksaan mencerminkan pentingnya peran governor. Bukti Pemeriksaan memberitahu kita bahwa ada hubungan antara pemerintahan yang efektif,



kualitas kepemimpinan dan manajemen, dan kualitas penyediaan dan prestasi murid. Pada tahun 2009/2010 pemerintahan yang baik atau luar biasa dalam 56% sekolah. Namun, hanya dalam waktu seperlima dari sekolah diperiksa, pengelolaan pemerintahan dinilai kurang efektif. Temuan ini menunjukkan ada potensi yang besar di banyak sekolah bagi Dewan untuk melakukan peningkatan hasil. Kepala Laporan Ratu Inspektur Tahunan untuk 2009/2010 mengidentifikasi bahwa: Dewan yang paling efektif ketika mereka sepenuhnya terlibat dalam evaluasi diri sekolah dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menantang sekolah, memahami kekuatan dan kelemahan dan berkontribusi untuk membentuk arah strategis. Sebaliknya, Dewan lemah cenderung gagal untuk memastikan persyaratan hukum terpenuhi, misalnya yang berkaitan dengan pengamanan.

Karakteristik utama dari badan pemerintah yang efektif hubungan positif antara Dewan dan pimpinan sekolah didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan dan transparansi. Badan pemerintahan yang efektif sistematis memantau kemajuan sekolah mereka dalam memenuhi target pembangunan yang disepakati. Informasi tentang apa yang sedang terjadi dengan baik dan mengapa, dan apa yang tidak berjalan dengan baik dan mengapa, dibagi. Pemimpin secara konsisten meminta informasi lebih lanjut, penjelasan atau klarifikasi. Hal ini membuat kontribusi dan perencanaan yang kuat untuk perbaikan. Pemerintah yang baik memberikan informasi dan pengetahuan yang berkualitas tinggi, informasi yang akurat yang ringkas dan terfokus pada prestasi murid. Informasi ini dibuat dapat diakses dan disajikan dalam berbagai format, termasuk diagram dan grafik.

Posisi Pemerintah dapat mengambil dan mendukung keputusan sulit dalam kepentingan murid: untuk mendukung kepala sekolah ketika mereka harus mengubah staf, atau untuk mengubah kepala sekolah ketika benar-benar diperlukan.

## **AKUNTABILITAS DAN *GOOD SCHOOL GOVERNANCE***

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi, transparansi, akuntabilitas adalah sebuah kesatuan yang saling berkaitan. Peningkatan partisipasi harus diikuti peningkatan transparansi dan kemudian akan diikuti peningkatan akuntabilitas yang mempengaruhi tujuan.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan dapat dipercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja

kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pendidikan kepada publik (Depdiknas dalam Panduan Manajemen Berbasis Sekolah).

Utrecht University School of Governance (USG) mempelajari organisasi publik dan interaksi mereka dengan lingkungan sosial dan administratif. Ini mungkin mengenai organisasi publik seperti lembaga pemerintah, tetapi juga organisasi swasta dengan tugas umum seperti rumah sakit, perusahaan perumahan dan perusahaan jasa. Fokus utama adalah bagaimana organisasi ini menangani isu-isu sosial saat ini dan memberi bentuk tanggung jawab publik mereka. Seperti yang disampaikan Tristiarini, (2005) investor akan bereaksi positif jika perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas ini dengan konsisten, investor dalam organisasi pendidikan dapat diartikan *stakeholder* yang terkait yaitu komite sekolah dan orangtua siswa atau masyarakat.

Sementara *The School Governance (Constitution)* (England) Regulations 2012 dalam rangka melaksanakan *Good School Governance* mensyaratkan setiap badan sekolah harus dipelihara dibentuk sesuai dengan peraturan sebagai berikut: (1) Jumlah anggota badan dari sekolah dipelihara harus tidak kurang dari tujuh dewan. (2) Badan pengelola sekolah harus menyertakan berikut: (a) setidaknya dua dewan induk; (b) satu gubernur staf, dan (c) satu gubernur otoritas lokal. (3) badan mungkin di samping menunjuk seperti sejumlah terkooptasi gubernur karena mereka anggap perlu asalkan persyaratan dalam peraturan terpenuhi dalam hal mengatur badan yayasan dan sekolah sukarela. (4) Jumlah terkooptasi dewan yang juga berhak untuk dipilih menjadi dewan staf di bawah Jadwal, ketika dihitung dengan dewan staf dan kepala sekolah, tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah anggota badan. Ketentuan tersebut merupakan suatu upaya dari pemerintah mengawasi manajemen sekolah melalui struktur yang efektif.

Sedangkan pelaksanaan GCG di Indonesia menurut Menurut Slamet (2005) dalam Darmawan ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas: Pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun anggaran. Keempat, menyusun indikator yang jelas tentang

pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*. Kelima, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* diakhir tahun. Keenam, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Alih-alih sekolah mengetahui sumberdayanya, sehingga dapat digerakan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan *stakeholders* untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu *stakeholders* sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Sekolah/Lembaga Pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah Lembaga Publik, di mana masyarakat memberikan kepercayaannya dalam hal pendidikan. *Good School Governance* (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Prinsip utama yang melandasi *good school governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi.

Temuan menunjukkan ada potensi yang besar dibanyak sekolah bagi Dewan untuk melakukan peningkatan hasil. Kepala Laporan Ratu Inspektur Tahunan untuk 2009/10 mengidentifikasi bahwa: Dewan yang paling efektif ketika mereka sepenuhnya terlibat dalam evaluasi diri sekolah dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menantang sekolah, memahami kekuatan dan kelemahan dan berkontribusi untuk membentuk arah strategis. Sebaliknya, Dewan lemah cenderung gagal untuk memastikan persyaratan hukum terpenuhi, misalnya yang berkaitan dengan pengamanan.

Tidak ada model *universal good governance* untuk sekolah. Tidak mungkin ada karena setiap situasi berbeda dan apa yang cocok untuk satu sekolah mungkin tidak sesuai lagi. Sebaliknya, pemerintahan yang baik memerlukan tinjauan konteks unik sekolah tertentu dan budaya. Struktur pemerintahan hanya akan efektif jika mengakui lingkungan dan konteks tertentu di mana sekolah beroperasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir N. Licht, 2002, *Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; European Corporate Governance Institute (ECGI)*, September.
- Daniri Mas Ahmad, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia..
- Darmawan, 2011, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah, Thesis.
- Mahendra Adi Negara, 2011, Penerapan Asas Akuntabilitas Untuk Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada BUMN Menurut Pasal 3 huruf c Kepmen no. Kep-117/mmbu/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada BUMN (Studi di PT Petrokimia Gresik ).
- Olssen Mark, Codd, & Anne-Marie O'Neill. (2004). *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*. London, Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications.
- Ofsted, 2011, *School governance: learning from the best*, May 2011, No. 100238
- Rakesh Sahni, 2008, *Proceeding of a conclave a cademika and govermanet officials of NEUPA*, New Dehli On Juni 2008
- Rizky Surya Perdana, 2008, Akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun)
- Slamet PH. 2005. Handout Kapita Selektta Desentralisasi Pendidikan diIndonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Tamita Utama.
- The School Governance (Constitution) (England) Regulations 2012*, Education England, No. 1034.
- Thomas S. Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, VOL.8, NO. 1, MARET 2006: 1-9 ISSN 1411-1438.
- <http://www.is.vic.edu.au/schools/governance/atb/governance3.htm>